

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung Jawa Barat.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Menoropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2005, *Hukum pembuktian*, PradnyaParamitha, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, Erlangga, Jakarta.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, 2007 cet.1, PT.Internusa, Jakarta.
- A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, 2017, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta.
- Soerjono Soekonto (a), 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.

- R. Subekti, 2008, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ridwan H.R, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the philosophy of Law)* diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bhartara Niaga Media, Jakarta.

Nico, 2003, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1*, Djambatan, Jakarta.

Muctar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Repulika, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Presfektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1*, Djambatan, Jakarta.

Muctar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Repulika, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Presfektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2011, *Sertipikat Hak atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta. Drs. Waskito, Ir. Hadi Arwono, M.App.Sc, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sayyid Sadiq, 1997, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, PenaPundiAksara, Jakarta.

Tim Redaksi Fokus media, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung.

Sihombing, 2005, *Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Abdurrahman, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Akamedika Pressindo, Jakarta.

Syafiie Hassanbasricit Ensiklopedia Islam, 2001, *Hibah*, Kompas, 3 Oktober, Jakarta.

Chairiumam Pasribu dan Suharwadi, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

PipipTapipah Surtini, S.H, 2019, *Peraturan Jabatan PPAT*, Rumah Grafis, Sumedang.

A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Herlien Budiono, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bagian Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.U.Sembiring, 1997, *Tehnik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialisasi Notaris. Fakultas Hukum USU, Medan.

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*

Sebagai Philipus M. Hadjon, 2001, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik", Post, Surabaya.

Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, No. 2 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor 24 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.

Badan Pertanahan Negara, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertnahan Negara Nomor 37 Tahun 1998.

Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009

Indonesia, Badan Pertanahan Negara, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor 37 Tahun 1998.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah , Nomor 2 Tahun 2018.

Kode Etik Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

SUMBER DATA LAIN

<https://www.artikata.com/arti-318245-akta.html>, diunduh 25 Juni 2021.

M. Syaifuddin, *Akta sebagai Alat Bukti, Apa dan Bagaimana* diunduh 25 Juni 2021, pukul 15.00 wib

<http://saifudionline.com/2009/04/akta-sebagai-alat-bukti-apa-dan- bagaimana.html>,
diunduh 25 Juni 2021

<http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/PTSL-Proses-dan-EvaluasiPro gram-Prioritas.pdf>, diunduh pada 26 Desember 2021, Pukul.15.00 wib.

<http://prodi1.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Modul-Pendaftaran-Tanah.pd f>, diunduh pada 26 Desember 2021, Pukul. 15.00 wib

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 15.00 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54912b4c6a82e/keabsahan-hib ah> diunduh Pada 28 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54912b4c6a82e/keabsahan-hib ah> diunduh Pada 28 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Duma Natalia D. Saragi, "Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah Oleh Pejabat Umum Yang Berwenang (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/ 2011)," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Endang Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri no.95/Pdt.G/2004/PNSMG)", Tesis Mgister Universitas Diponegoro, 2009.

Syafiie Hassanbasri cit Ensiklopedia Islam, *Hibah*, (Jakarta: Kompas, 3 Oktober 2001)

Ketut Suriawan dan Ni Ny. Mariadi, "Proses Peralihan Hak atas Tanah dalam Bentuk Akta Hibah," *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2 (Desember 2017), hlm. 58.

Enrico Herinanto Tanzil, Siti Hajati Hoesin, dan Liza Priandhini, Penguasaan Hak Atas

Tanah Berdasarkan Akta Hibah Palsu (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/Pid/2016/PT PTK)," *Jurnal Universitas Indonesia*, hlm.6.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54912b4c6a82e/keabsahan-hibah> diunduh Pada 28 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB. Duma Natalia D. Saragi, "Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah Oleh Pejabat Umum Yang Berwenang (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/ Pdt/ 2011)," Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Endang Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri no.95/Pdt.G/2004/PNSMG)," Tesis Mgister Universitas Diponegoro, 2009.

Syafiie Hassanbasri cit Ensiklopedia Islam, *Hibah*, (Jakarta: Kompas, 3 Oktober 2001)

Ketut Suriawan dan Ni Ny. Mariadi, "Proses Peralihan Hak atas Tanah dalam Bentuk Akta Hibah," *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2 (Desember 2017), hlm. 58.

Enrico Herinanto Tanzil, Siti Hajati Hoesin, dan Liza Priandhini, Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Hibah Palsu (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/Pid/2016/PT PTK)," *Jurnal Universitas Indonesia*, hlm.6.

Elizabeth Anjani Putri Hariyanto, “*Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembuatan Akta Hibah atas Tanah yang Dibatalkan Pengadilan*”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 9, (September 2021), hlm. 4432.

